

CO-VALUE

JURNAL EKONOMI, KOPERASI & KEWIRAUSAHAAN

Vo. 1 No. 1/Januari 2010

ISSN : 2086-3306

GRAH BUSTIL ARIFIN

**Inventarisasi Masalah-masalah
Pengembangan Koperasi
dan UKM**

(H.R.M. Ramudi Grillo)

**Peranan Koperasi Dalam Upaya
Meningkalkan Skala Usaha dan
Efisiensi Usaha Anggota**

(Nurchayat Indra)

**Implementasi Perhitungan
Promosi Ekonomi Anggota
Sebagai Dasar Evaluasi**

Kinerja Koperasi

(Sukmahadi dan Eka Setiastika)

**Kajian Eksplorasi Koperasi
Energi dan Agrowisata :
Pemikiran Peluang**

dan Tantangan

(H. Erny Suryadi dan Agus Grillo)



SUSUNAN DEWAN REDAKSI

- Pelindung** : Rektor IKOPIN
(Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si)
- Penasihat** : Wakil Rektor I Bidang Akademik
(Drs. H. Dindin Burhanudin., M.Sc)
Wakil Rektor II Bidang Kerjasama
(Ir. H. Indra Fahmi, M.Si)
Wakil Rektor III Bidang Administrasi SDM, Keuangan, RTP, Humas dan Umum.
(Drs. Adeng Kasmiri, M.Si)
- Pembina** : Ketua Program Studi Manajemen
(Ir. Hj. Yuanita Indriani, M.Si)
- Redaksi Ahli** : Prof. Dr. Drs. H. RM. Ramudi Arifin, MSi (IKOPIN)
Prof. Dr. H. Yuyun Wirasasmita, MSc. (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. H. Tupahwana Priatna Sendjaja. (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. H. Burhan Arif (UNPAD)
Prof. Dr. Faisal Aliff, Spec.Lic. (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. H. Rusidi, MS. (UNPAD)
Prof. Dr. Hj. Ina Primiana, SE, MSIE. (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. Hakim Malasan. (ITB)
Dr. H. Sugiyanto, SE.,MSc (IKOPIN)
Dr. Ir. H. Erry Supriyadi, MT. (IKOPIN)
- Pemimpin Redaksi** : Drs. Wahyudin, MT
Wakil Pemimpin Redaksi : Drs. Eka Setiajatnika, MSi
Anggota : Ir. Nurhayat Indra, MSc
Drs. Sukmahadi, Ak., MSi
- Tata Usaha dan Sirkulasi** : Sri Hidayati, S.Sos
Didi Mulyadi

Kantor Redaksi

Gedung Program Studi Manajemen IKOPIN Lt.2
Jl. Raya Jatiningor Km. 20,5 Bandung Telp. (022) 7798179 Fax. (022) 7796033
e-mail : co-value@ikopin.ac.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Pengantar Redaksi	2
Inventarisasi Masalah-masalah Pengembangan Koperasi dan UKM Oleh: Prof. Dr. H.R.M. Ramudi Arifin	3
Pembangunan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Kemitraan Oleh: Drs. Adeng Kasmiri, M.Si dan Suarny Amran, SH, MH	7
Fungsi Koperasi Dalam Meningkatkan Skala Usaha dan Efisiensi Usaha Anggota Oleh: Nurhayat Indra, Ir, MSc.	20
Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota Sebagai Pengukuran Keberhasilan Koperasi Oleh: Sukmahadi, SE, Ak, M.Si, dan Eka Setiajatinika, SE, M.Si.	30
Identifikasi Faktor-faktor Dominan Sebagai Motivasi untuk Menjadi Anggota Koperasi Oleh: Drs. Wahyudin, MT.	38
Kajian Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Barat Oleh: Dra. Lely Savitri Dewi, SE, M.Si, dan Ir. H. Indra Fahmi, M.Si,	43
Kajian Eksplorasi Koperasi Energi dan Koperasi Wisata: Pemikiran, Peluang dan Tantangan Oleh: Dr. Ir. H. Ery Supriyadi R. MT, dan Agus Arifin, SE, Ak, M.Si.	49
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pinjaman Bermasalah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja KSPIUPS Koperasi Oleh: Rosli Setiawati, SE, M.Si dan Iwan Mulyana, SE, M.Si.	59

CATATAN UNTUK PENULIS

CO-VALUE Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan diterbitkan sebagai media informasi dan komunikasi serta forum pembahasan dan pengkajian masalah disiplin ilmu ekonomi dalam bidang manajemen, akuntansi, studi pembangunan, koperasi dan kewirausahaan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Redaksi mengundang para ahli, dosen, sarjana, dan praktisi untuk menulis secara bebas dan kreatif. Penyajian dapat berupa artikel, hasil penelitian, atau gagasan orisinal yang segar, obyektif dan penuh tanggungjawab. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan dilengkapi abstrak bahasa Indonesia/Inggris, masing-masing tidak boleh lebih dari 200 kata, disusun dengan urutan: judul tulisan, nama penulis, abstrak, *keyword*/kata kunci, isi tulisan, daftar pustaka dan dilengkapi riwayat penulis, dengan urutan: nama lengkap dengan gelar resmi yang dipakai, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/jabatan terakhir. Jika tulisan berupa hasil penelitian, isi disusun dengan urutan: pendahuluan, latar belakang yang mencakup pokok permasalahan dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, pendekatan atau bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Panjang naskah kurang dari 6000 kata. Bila penulis lebih dari seorang, cantumkan namanya secara berurutan sesuai dengan kode etik penulisan. Tabel, gambar dan grafik harus diberi judul singkat, jelas, diberi nomor urut, jelas, dan asli. Untuk naskah yang pernah dimuat dalam penerbitan lain atau pernah disampaikan dalam ceramah, seminar/diskusi harus disebutkan dalam catatan pada halaman pertama. Naskah dapat dikirim melalui Email: co-value@ikopin.ac.id atau dikirim ke redaksi CO-VALUE, Gedung Prodi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), Kawasan Pendidikan Tinggi Jatimangar KM 20.5 Bandung Jawa Barat - Indonesia Telp. 022-7798179; 022-7796033; 022-7794444 Fax. 022-7796033. Website: www.ikopin.ac.id.

Pembaca yang budiman,

Jurnal CO-VALUE volume I nomor 1 ini merupakan jurnal terbitan perdana yang menurunkan beberapa tulisan antara lain: "Inventarisasi Masalah-masalah Pengembangan Koperasi dan UKM", karya Prof. Dr. H.RM. Ramudi Arifin, SE., MSi. Tulisan Ir. Nurhayat Indra, MSc, tentang "Peranan Koperasi Dalam Upaya Meningkatkan Skala Usaha dan Efisiensi Usaha Anggota", karya Sukmahadi, SE.,Ak., MSi dan Eka Setiajatnika, SE., MSi, tentang "Implementasi Perhitungan Promosi Ekonomi Anggota Sebagai Dasar Evaluasi Kinerja Koperasi", dan karya Dr. H. Erry Supriyadi, MTi dan Agus Arifin., SE., Ak., MSi tentang "Kajian Explorasi Koperasi Energi dan Agrowisata: Pemikiran Peluang dan Tantangan".

Masalah mendasar yang melilit gerakan koperasi di Indonesia adalah penampilan kinerja yang tidak sesuai dengan nilai, norma dan prinsip-prinsip yang dianutnya. Penyebab utamanya adalah belum dipahaminya konsep berkoperasi secara utuh baik oleh para pelakunya maupun oleh pembinanya, demikian pendapat H.RM.Ramudi Arifin.

Sementara itu, Erry Supriyadi dan Agus Arifin, bahwa secara normatif dan makro ekonomis, koperasi mampu mengelola kepariwisataan dan energi, untuk itu perlu mempersiapkan komponen sumberdaya koperasi bagi perusahaan maupun pengelolaan kepariwisataan dan energi yang mencakup sumber daya manusia, finansial, dan teknologi.

Pembaca yang budiman,

Untuk mengetahui tulisan-tulisan lainnya, kami mempersilahkan pembaca untuk membaca tulisan lain yang tidak kalah menariknya untuk disimak isi keseluruhan jurnal CO-VALUE volume I nomor 1 pada bulan ini.

Redaksi

KAJIAN EKSPLORASI KOPERASI ENERGI DAN KOPERASI WISATA: PEMIKIRAN, PELUANG, DAN TANTANGAN

Oleh: Ery Supriyadi R. dan Agus Arifin

Abstrak

Pemberdayaan koperasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi, dan menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sektor energi dan pariwisata adalah sektor strategis yang dapat diraih oleh koperasi untuk meningkatkan peran dan fungsinya berkontribusi bagi anggota dan masyarakat. Secara normatif dan makro ekonomis, koperasi mampu mengelola kepariwisataan dan energi, tetapi perlu mempersiapkan komponen sumberdaya koperasi bagi pengusaha maupun pengelolaan kepariwisataan dan energi yang mencakup sumber daya manusia, finansial, dan teknologi.

Koperasi memainkan peran sebagai produsen energi, pemasok kebutuhan energi, pengelola layanan energi yang terintegrasi secara sistemik. Koperasi dapat berperan sebagai katalisator, mediator, fasilitator, atau integrator kegiatan kepariwisataan bersama anggota. Peran koperasi akan dirasakan pada sektor energi jika memberikan manfaat ekonomi berupa tarif maupun harga dan layanan energi yang terjangkau dan disepakati bersama oleh anggota dalam wadah rapat anggota, serta manfaat ekonomi tidak langsung dalam bentuk pengembalian nilai partisipasi anggota dalam pemanfaatan energi kepada anggota. Kegiatan koperasi dalam kepariwisataan membuka peluang pengembangan unit usaha koperasi dan manfaat bagi anggota. Koperasi wisata akan memberikan nilai tambah bagi anggota. Koperasi sebagai badan usaha dan gerakan koperasi perlu proaktif mengambil peran dalam sektor pengusaha dan pengelolaan energi maupun pariwisata.

Keyword : *Pariwisata, Energi, Koperasi, Pengelolaan, Pengusahaan, Manfaat.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu dokumen legalitas formal pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang (RPJM/RPJJP), yang diantaranya memuat penjelasan program pembangunan yang menempati koperasi pada posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar

dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar. Disamping itu, koperasi dan UMKM berperan pula dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mengupayakan pemerataan pendapatan masyarakat. Pada saat yang bersamaan dengan itu, upaya meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional merupakan tantangan pembangunan dalam era globalisasi saat ini. Dengan perspektif peran seperti itu, maka tujuan pem-

berdayaan koperasi di antaranya adalah meningkatkan produktivitas KUMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi, meningkatkan kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi, dan berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dilaksanakan dengan mengembangkan Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Selain itu, dilakukan pula upaya meningkatkan peran koperasi sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperluas basis kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks sasaran dan arah pengembangan koperasi tersebut di atas, maka koperasi dapat mengambil peran dalam berbagai sektor pembangunan secara aktif guna memberikan nilai manfaat bagi anggota dan masyarakat.

Salah satu program sektor pengembangan energi adalah program listrik masuk desa yang dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat di daerah pedesaan, serta meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat pedesaan. Pengadaan listrik dengan menggunakan sumber energi setempat, seperti tenaga air mikro, energi angin, energi surya, dan energi biomassa perlu terus dikembangkan dalam rangka pembangunan sumber energi yang hemat-hematnya dan tidak berdampak kerusakan lingkungan alam. Koperasi diharapkan dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam menyediakan dan mengelola energi.

Selanjutnya sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia, Indonesia dikaruniai alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, terdiri dari berbagai macam suku dengan corak ragam budayanya yang unik, memiliki potensi yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi destinasi-destinasi baru pariwisata bertaraf internasional. Sektor ini, jika dikelola secara profesional akan memberikan nilai tambah (*added value*) baik secara ekonomi, sosial

(jasa) dan lingkungan (sumberdaya) maupun nilai strategis lainnya.

Pariwisata dan energi merupakan sektor pembangunan yang cukup signifikan dan strategis sebagai roda penggerak ekonomi. Jika koperasi berperan dalam sector pembangunan ini, muncul pertanyaan mengenai adakah peluang bagi koperasi untuk mengusahakan dan mengelola kepariwisataan dan energi, apakah koperasi memiliki kemampuan untuk mengusahakan dan mengelola kepariwisataan dan energi, sejauhmana koperasi mampu mengelola kepariwisataan dan energi, serta apakah tersedia sumberdaya koperasi untuk mengelola kepariwisataan dan energi (SDM, finansial, teknologi). Tulisan ini mencoba mengkaji peluang dan tantangan peran koperasi dalam kedua sektor pembangunan tersebut sebagai suatu pemikiran awal.

II. Pembangunan Koperasi dan Energi

Untuk mencapai sasaran pembanguan koperasi, maka program pemberdayaan koperasi dan UKM di arahkan pada program pokok, yaitu program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, pengembangan sistem pendukung usaha, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif, pemberdayaan usaha skala mikro, dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat, koperasi menjadi dibutuhkan dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat, terlebih dalam krisis energi yang dialami Indonesia saat ini. Falsafah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dalam pembangunan perekonomian Indonesia dilandasi pada upaya pemberdayaan koperasi sebagai soko guru perekonomian yang pada hakekatnya menempatkan koperasi sebagai institusi atau lembaga perekonomian tidak sebatas pada kepentingan-kepentingan ekonomi saja melainkan juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama anggota koperasi. Jika seluruh masyarakat pengguna energi menjadi anggota koperasi, berarti koperasi berkewajiban memberi layanan yang terbaik bagi anggotanya, dan sekaligus perkembangan dan kemajuan koperasi dirasakan dan dinikmati msasyarakat sebagai pemilik usaha koperasi.

Koperasi dalam melayani dan mengembangkan usaha memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tanggungjawab koperasi sebagai lembaga

perekonomian rakyat. Koperasi berorientasi pada pemberdayaan anggota dalam kepemilikan aset produksi ekonomi dan pelayanan secara simultan. Koperasi Indonesia mengutamakan kemakmuran anggotanya dan masyarakat sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, bukan keuntungan orang seorang. Pengakuan dan pertumbuhan koperasi akan meningkat, manakala kinerja koperasi dirasakan manfaatnya oleh anggota baik dalam bentuk layanan langsung maupun tidak langsung.

Pengembangan peran koperasi pada sektor energi selanjutnya dibangun dari kesadaran untuk melakukan usaha bersama dalam koperasi pada sektor energi, yaitu sebagai dinamisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi secara mandiri. Idealnya, koperasi dapat tumbuh berkembang dan mengambil peran "revolusioner", menghimpun kekuatan ekonomi yang diproduksi oleh rakyat banyak guna menjawab tantangan ekonomi global. Koperasi secara kolektif berusaha meningkatkan proses-proses produksi bidang energi untuk menjadi lebih produktif dan efisien. Koperasi dapat mengambil peran dalam pemberdayaan di sektor energi agar unit ekonomi dan usaha kecil sebagai anggota koperasi yang dimilikinya mendapatkan manfaat langsung dari perusahaan atau pengelolaan energi.

Terdapat cukup banyak peluang dalam upaya pemberdayaan koperasi intervensi pemerintah melalui kemudahan dan fasilitasi pemodal usaha, sistem pembinaan manajemen usaha, pelatihan dan peningkatan skill, ketersediaan bahan baku dan penunjang lain guna kelangsungan produktivitas usaha bagi koperasi. Jaringan distribusi dan pemasaran pada iklim persaingan juga menjadi kebutuhan koperasi yang perlu mendapat perhatian, mengingat pada satu sisi kebutuhan energi menjadi kebutuhan orang banyak, di sisi lain persaingan usaha yang adil dan seimbang haruslah terjadi. Untuk itu, kemampuan koperasi berusaha dan pengelolaan sector akan jauh lebih dahulu penting untuk dipikirkan dan dioperasikan dari pada sekedar menunggu bantuan/dukung dari pemerintah.

Sinergi antara pertumbuhan koperasi dengan perekonomian nasional dalam sector energi diharapkan terjadi, sehingga keadaan ini akan memiliki daya tahan perekonomian rakyat menghadapi situasi krisis energi. Sinergitas ini diharapkan akan berdampak pada daya tahan ekonomi rakyat melalui koperasi. Pada saat kejadian krisis ekonomi tahun 1997,

koperasi dan UMKM menunjukkan kemampuan sebagai sector yang kenyal dan kuat menghadapi krisis, bahkan menjadi katup pengaman perekonomian. Sementara pada saat krisis tersebut, usaha-usaha swasta dan BUMN tidak menunjukkan signifikansi dalam pertumbuhan perekonomian bangsa, bahkan menyisakan permasalahan, seperti masalah kepailitan, defisit dan pelarian atau penyalahgunaan modal usaha, kesejahteraan buruh, termasuk beberapa kegiatan usaha pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Secara legalitas, sayangnya koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia sebagai soko guru perekonomian Indonesia dalam pasal 33 UUD 1945 telah diamandemen, padahal ekonomi koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung nilai-nilai strategis budaya bangsa yang berisi asas kekeluargaan dan kemandirian, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Koperasi merupakan wujud kehidupan berbangsa dan bernegara bermuara pada terwujudnya keadilan sosial. Bahkan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan semangat, arah dan gerak keadilan sosial, memposisikan koperasi tidaklah semata-mata menjadi lembaga perekonomian tetapi juga wahana berkumpul, tukar pendapat serta membicarakan persoalan kehidupan masyarakat termasuk problematika energi.

Koperasi yang ada di desa maupun kota dapat menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya masing-masing. Maju mundurnya koperasi akan tercermin dari semangat membangun wilayahnya secara bersama-sama. Tidaklah dapat dipungkiri, bahwa kenyataannya koperasi menghadapi berbagai kendala dan tantangan dan menjalankan fungsinya, sehingga harapan tersebut masih sangat terbatas dan jauh dari harapan.

Sejarah menunjukkan pula bahwa koperasi berperan dan berfungsi dalam menghadirkan swasembada pangan dan mengentaskan kemiskinan pada masa lalu dan saat krisis ekonomi. Namun demikian prestasi kemajuan koperasi ini dipersepsikan sebagai usaha dalam skala kecil-kecil dan tersebar-luas, sehingga koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat distreotipkan sebagai lembaga perekonomian yang tidak memberi keuntungan signifikan, bahkan sebatas dijadikan alat legitimasi institusional perilaku penguasa. Lebih diperparah lagi terdapat upaya mendiskreditkan keberadaan koperasi sebagai cikal bakal keterpurukan sistem perekonomian nasional ketika memilih

pemberdayaan perekonomian rakyat melalui koperasi. Pembangunan koperasi dalam hal ini dihadapkan pada dua sisi mata pedang yang tajam, yaitu sisi intervensi yang memberdayakan dan memperkuat koperasi, sisi lainnya membalasi gerak langkah dan menegasikan koperasi.

Secara realitas, ketahanan perekonomian nasional dalam krisis ekonomi ditopang oleh koperasi, ekonomi kecil dan menengah yang ada di masyarakat. Dinamika koperasi (pedagang, pasar, komdotas, desa, fungsional) dan partisipasi aktif para anggotanya menjadi tonggak utama ketahanan ekonomi mengatasi krisis ekonomi. Koperasi telah nyata memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan dan pemberdayaan perekonomian daerah maupun nasional, di antaranya adalah KUD Penerus Baru di kabupaten Tapi yang bergerak di Usaha besar Batu Bara, Kojalisba (Koperasi Jasa Kelistrikan Bali) yang anggotanya adalah para direktur perusahaan kontraktor listrik (Bisnis Indonesia, Edisi Khusus Juli 2008). Saat ini kesemua koperasi sektor energy di atas telah menjadi unit-unit usaha beromzet milyaran rupiah.

Pemerintah mulai meneguhkan keberadaan dan pemberdayaan koperasi dan UKMK, yang terlihat pada keseriusan pemerintah melakukan upaya-upaya penguatannya melalui pemberian insentif, tambahan APBN, penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai skema akses pembiayaan dan upaya percepatan tumbuhnya sektor riil. Hal ini ditujukan untuk membuka perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, sekaligus membesarkan koperasi.

III. Peluang dan Tantangan Koperasi Energi

Sektor energy merupakan sektor strategis dalam mendukung gerak perindustrian dan perekonomian di pedesaan maupun di perkotaan. Energi yang tersedia untuk menunjang kegiatan ekonomi harus seimbang dengan kebutuhannya, jika tidak akan memunculkan kesenjangan bahkan krisis energi yang dapat mengganggu gerak pembangunan dan roda gerakan ekonomi. Energi terbarukan maupun tidak terbarukan memerlukan strategi pengelolaan dan pengusahaan sumber energi. Salah satu sumber energy yang cukup strategis adalah jenis berasal dari mikro hidro, solar sistem, dan bio-energi.

Secara supra sistem, koperasi dapat berperan dalam mengusahakan dan mengelola energy baik bahan bakar minyak, gas, listrik. Persoalan mendasar

dari pengusahaan energi oleh koperasi adalah keterbukaan kesempatan dan kemampuan koperasi itu sendiri. Jika kesempatan pengusahaan energy terbuka bagi koperasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kebijakan pengusahaan dan pengelolaan oleh koperasi.
2. Kelembagaan koperasi (organisasi, keanggotaan, finansial) pada tingkat nasional dan daerah.
3. Kelembagaan Pengelolaan dan Pengusahaan Energy oleh koperasi pada tingkat pedesaan dan perkotaan (Skala produksi, Skala pelayanan, Skala pengembangan (anggota, non anggota, masyarakat, barang publik).
4. Kebijakan, Tantangan Koperasi pada operasionalisasi pengusahaan dan pengelolaan energi.
5. Peluang dan tantangan profesionalisme koperasi dalam pengelolaan dan pengusahaan energi:
 - o Koperasi tidak siap dan tidak mampu meraih kesempatan.
 - o Koperasi tidak siap tapi mampu.
 - o Koperasi siap dan mampu.
 - o Koperasi siap tetapi tidak mampu.

Sajian berikut ini merupakan contoh operasional pada tingkat mikro di satu desa dalam pengelolaan energi listrik. Mikro hidro adalah salah satu sumber energi yang menghasilkan daya energi listrik yang cukup besar. Operasional PLTM pada suatu desa mampu menyediakan tenaga listrik yang dibutuhkan serta mampu menyerap tenaga kerja. Pada PLTM memerlukan tenaga kerja untuk merencanakan konstruksi jalan, kolam aiau waduk, pipa pesat, rumah jaga, konstruksi turbin dan generator yang sesuai dengan debit air dan tinggi jatuh air, transmisi, distribusi, instalasi rumah, serta gardu-gardu, menghitung biaya penyambungan pertama, dan harga jual per KWH, serta mendapatkan konsumen baru, dan keamanan. Dengan demikian, jika koperasi akan mengelola dan mengusahakan energi yang bersumber dari mikro hidro, perlu menyiapkan dan menyediakan tenaga professional yang handal dan memadai. Hal ini diperlukan untuk menyajikan sediaan energy yang cukup dan memberikan layanan optimal yang memuaskan bagi para pelanggan (anggota dan masyarakat). Pengelolaan PLTM pada saat beroperasi sedikitnya memerlukan tenaga 7 orang dari putera-puteri dari anggota KUD yang harus diberi pendidikan terlebih dahulu, 2 orang dalam bidang listrik, turbin, 2 orang dalam bidang

penyambungan konsumen baru, pencatatan meteran, dan penagihan rekening listrik, 1 orang pesuruh, dan 1 orang sebagai penanggung jawab dan koordinator.

Jika menggunakan jenis PLTS, koperasi memerlukan tenaga kerja dalam pembangunan ke-listrikan desa adalah 2 orang untuk pemasangan solar sel dan instalasi rumah beserta alat pengaman, 1 orang untuk menganalisis data sosial, ekonomi dalam rangka penghitungan pendapatan penduduk per jiwa. Tentunya, tenaga kerja ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai solar system, jika perlu diberikan pendidikan khusus untuk hal tersebut. Pada saat operasi, pengelolaan PLTS memerlukan 6 orang dari putera-puteri dari anggota koperasi yang harus diberi pendidikan terlebih dahulu, 2 orang dalam bidang perawatan PLTS dan penyambungan konsumen baru, 1 orang penagihan iuran dan penyeteroran ke bank, 1 orang satpam, 1 orang pesuruh, dan 1 orang penanggung jawab atau koordinator.

Untuk pengelolaan tenaga listrik PLN pada saat operasi memerlukan tenaga 6 orang yang harus diberi pendidikan, 2 orang dalam bidang perawatan listrik dan penyambungan konsumen baru, 1 orang untuk pencatatan meteran, 1 orang untuk penagihan rekening listrik, 1 orang pesuruh, dan 1 orang penanggung jawab atau koordinator. Semua tenaga ini berasal dari keluarga anggota koperasi, yang secara langsung memberi pembelajaran dan manfaat pengelolaan energy kepada anggota koperasi, juga menjadi regenerasi sumberdaya manusia koperasi pada masa yang akan datang, *membership promotion*.

Jika koperasi diberi kesempatan dan mampu menjalankan pengelolaan sumber energi, maka hubungan kegiatan ekonomi dari energi seharusnya lebih efektif dan efisien. Proses produksi energi yang dilakukan oleh koperasi atas prakarsa bersama para anggota di suatu desa secara musyawarah mufakat, diikuti dengan pengelolaan konsumsi yang terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat/anggota, didukung oleh sistem distribusi dan pengelolaan yang professional dari segenap sumber daya yang dimiliki koperasi. Kondisi ini merupakan pelayanan publik dalam sektor energi dalam rangkaian kegiatan ekonomi optimum. Kecukupan pasokan energi guna pemenuhan kegiatan anggota dan masyarakat akan mendukung gerak usaha ekonomi produktif dan kreatif anggota. Kepuasan layanan menjadi kesepakatan dan ciri khas koperasi, dimana anggota

sebagai pelanggan mendapatkan layanan optimal di samping sebagai pemilik organisasi koperasi itu sendiri. Dengan demikian, koperasi berperan sebagai produsen energi, pemasok kebutuhan energi, pengelolaan layanan energi yang terintegrasi secara sistemik. Peran koperasi akan semakin dirasakan dengan perolehan manfaat ekonomi langsung berupa tarif maupun harga energi yang terjangkau dan disepakati bersama oleh anggota dalam wadah rapat anggota, serta manfaat ekonomi tidak langsung dalam bentuk pengembalian nilai partisipasi anggota dalam pemanfaatan energi kepada anggota melalui mekanisme sisa hasil usaha atau promosi ekonomi anggota.

IV. Pembangunan Koperasi dan Kepariwisata

Terdapat sejumlah alasan mengapa sebuah negara khususnya negara berkembang merancang sektor pariwisata salah satu sektor unggulan. Alasan umum pengembangan pariwisata adalah bahwa segala sumberdaya harus seoptimal mungkin digunakan dan dialokasikan sebagai upaya untuk menghasilkan nilai manfaat. Kegiatan pariwisata mampu memberikan kontribusi secara signifikan dan penting bagi perekonomian negara. Adapun alasan khusus dari keberadaan kepariwisataan dalam perekonomian adalah (1) sebagai sumber pendapatan nilai tukar mata uang asing, (2) sebagai industri ekspor, pariwisata tidak menghadapi aturan pembatasan dan kuota seperti barang-barang pabrik, bahan mentah dan produk-produk kebutuhan dasar, (3) wisatawan hanya menggunakan infrastruktur alam, misalnya kondisi iklim, sejarah, kebudayaan dan sebagainya yang tidak didesain khusus, (4) pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja, serta (5) sebagai sebuah aktivitas campuran yang dapat menjadi pendorong bagi produk sektor lain, seperti makanan, cinderamata, akomodasi dan infrastruktur lainnya. Dengan demikian, kepariwisataan memberi nilai tambah dan *multiplier effect* yang besar dalam menggerakkan roda ekonomi baik secara wilayah maupun sektor kegiatan ekonomi.

Pada pasal 17 UU No. 10, Tahun 2008 tentang Kepariwisata secara eksplisit mengamankan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan dukungan kebijakan kepada Koperasi dan UMKM untuk berperan sebagai pelaku industri pariwisata secara luas. Pada saat yang sama pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM juga telah memberikan fasilitasi penguatan

modal kepada beberapa koperasi yang mengelola obyek-obyek wisata, disamping juga ada beberapa koperasi secara alamiah yang telah masuk dalam industri pariwisata.

Indonesia sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia, dengan karunia alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, terdiri dari berbagai macam suku dengan corak ragam budayanya yang unik, memiliki potensi yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi destinasi-destinasi baru agrowisata bertaraf internasional. Sektor ini, jika dikelola secara profesional akan memberikan nilai tambah (*added value*) baik secara ekonomi, sosial (jasa) dan lingkungan (sumberdaya) maupun nilai strategis lainnya. Terlebih lagi didukung adanya fakta bahwa, trend wisatawan internasional kini bergeser ke kawasan Asia-Fasifik yang merupakan destinasi-destinasi baru yang masuk kedalam kategori alternatif tourism yang didalamnya termasuk *village tourism*, *adventure tourism*, *agrotourism*, dan *ecotourism* (Wienid Nuryanti, 2009).

Masalah utamanya adalah bagaimana rumusan dan implementasi strategi bagi pengembangan koperasi berbasis pariwisata. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar bagaimana koperasi mengembangkan usaha pariwisata yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat lokal dengan mempertimbangkan lingkungan dan peluang pasar. Tentunya hal ini berkait dengan suprastruktur, infrastruktur, pengelolaan, dan kelembagaan dari bidang perkoperasian dan kepariwisataan.

Pengembangan berbasis destinasi pariwisata menggunakan konsep *borderless*, artinya pengembangan pariwisata tidak memisah-misahkan pengembangan berdasarkan batas-batas wilayah administratif, sehingga pengembangan pariwisata pada suatu wilayah tidak berdasarkan pada pendekatan wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pergerakan wisatawan, baik dalam paket perjalanan maupun perjalanan bebas bersifat elastis dan tidak mengenal batas ruang administrasi. Pengembangan pariwisata mengarah pada keterpaduan lintas wilayah demi membangun daya tarik kolektif yang kuat. Oleh karena itu, integrasi rencana tata ruang wilayah antar propinsi, dan antara kabupaten/kota akan menentukan pula determinasi keberhasilan kegiatan pengembangan agrowisata sebagai sektor penggerak ekonomi wilayah dan masyarakat, sehingga struktur jaringan, kelembagaan, sistem layanan dalam

kepariwisataan pada suatu wilayah sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi fungsi kepariwisataan dan mengakselerasikan perkembangan atraksi, aktivitas, akses, dan menitas supaya produk wisata yang bernilai tambah.

Pengembangan pariwisata berbasis destinasi menggunakan konsep *cluster* (klaster), yaitu pengembangan pariwisata yang menekankan adanya sebuah entitas daerah tujuan wisata yang merupakan 'konsentrasi geografis dari mata rantai usaha produksi sector tertentu dan inslitusi pendukungnya yang membentuk jaringan kerja yang sinergis dan komplementer'. Dengan demikian, orientasi pengembangan pariwisata berbasis destinasi mengarah pada jalinan jaringan kerja yang terkonsentrasi pada mata rantai usaha dan institusi dan keterikatan yang kuat antar.

Pengembangan pariwisata berbasis destinasi juga menggunakan *market driven*, artinya bahwa pengembangan pariwisata didasarkan pada keinginan pasar, pasar sebagai penggerak, dan selera psara terhadap produk wisata yang diminati untuk dapat dinikmati. Persepsi wisatawan mengenai destinasi pariwisata menjadi faktor kunci dan penting yang dipertimbangkan dalam penetapan suatu obyek atau kawasan sebagai destinasi pariwisata. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dari dan menuju lokasi pariwisata menjadi kunci keberhasilan penunjang dan pelancar keberadaan dan perkembangan kegiatan pariwisata pada suatu wilayah. Rencana tata ruang, rencana pembangunan, dan rencana sektor pariwisata yang terintegrasi dan bersinergi akan memperkuat dan mempercepat proses dan hasil kegiatan agrowisata.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengembangan pariwisata sangat berhubungan erat dengan kebijakan tata ruang, kebijakan pembangunan, dan sektoral pada semua tingkat wilayah maupun pemerintahan. Kebersamaan dan kerjasama antar pemerintah daerah, antara pemerintah pusat dan daerah, dan segenap pemangku kepentingan memiliki tugas dan kewajiban bersama mengembangkan agrowisata sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal dan upaya mengentaskan kemiskinan berbasis pariwisata. Pengembangan pariwisata di Indonesia terkait erat dengan pembinaan kebudayaan yang terarah pada pembangunan karakter dan sikap bangsa yang penuh dengan kemandirian. Pada sisi lainnya, pengembangan pariwisata memerlukan investasi jaringan jalan,

investasi energi, penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman, pendayagunaan sumberdaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal/koperasi. Dengan demikian pengembangan agroekoturisme memerlukan kebijakan-kebijakan ruang, sektor, dan kegiatan teknis yang mendukung kelancaran kegiatan pengembangan agrowisata yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Aksesibilitas adalah sarana yang mempermudah wisatawan untuk mencapai daerah tujuan wisata. Aksesibilitas mencakup dukungan sistem transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan, dan moda transportasi, termasuk di dalamnya menyangkut waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai daerah tujuan wisata serta tanda petunjuk arah dan sebagainya. Destinasi pariwisata juga menyangkut amenitas, yaitu fasilitas pendukung demi kelancaran kegiatan pariwisata yang ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Amenitas mencakup fasilitas akomodasi, rumah makan, retail, toko cinderamata, biro perjalanan wisata, pusat informasi pariwisata, pusat kesehatan, pusat layanan perbankan, sarana komunikasi, pos keamanan, ketersediaan air bersih dan listrik. Dengan demikian, kebijakan tata ruang, tata lingkungan, dan sektoral yang terkoordinasi dan terintegrasi antar wilayah dan pemerintahan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pengembangan kegiatan agrowisata dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Pengembangan agrowisata mensyaratkan adanya dukungan yang sistemik dan integral antar kebijakan dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata dan penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan kopriwisata di Indonesia.

Secara ekonomi, pariwisata sesungguhnya sebagai komoditi ekspor, yaitu ekspor jasa. Keunikannya komoditi pariwisata tidak bergerak ke luar negeri tetapi jasa dan nilainya saja yang bergerak keluar negeri (Spillane, 1994). Pariwisata sangat bergantung pada sumber daya ekonomi partikular (tertentu/khusus) di negara pengeksport. Pariwisata tergantung pada sumber daya ekonomi yang tidak dapat dipindah seperti panorama alam pegunungan yang indah, hamparan pantai yang berudara tropis yang segar, atau kebudayaan yang khas dengan rumah-rumah adat dan/atau bangunan-bangunan bersejarah.

Ciri-ciri khas ekonomi dari industri pariwisata menjelaskan jenis dampaknya terhadap masyarakat

tempat wisata. Lebih lanjut Spillane (1994) menjelaskan paling sedikit ada lima ciri-ciri khas yang khusus dimiliki oleh industri pariwisata, yaitu: (1) produk pariwisata tidak dapat disimpan; (2) permintaan produk pariwisata tergantung pada musim (*highly seasonal*); (3) permintaannya dipengaruhi oleh faktor luar dengan pengaruh yang tidak dapat atau sulit diramalkan (*unpredictable influences*); (3) permintaannya dipengaruhi oleh perubahan dalam nilai kurs valuta, keddaktentruman politik, dan perubahan cuaca, pandemi suatu penyakit; (4) permintaan tergantung pada sejumlah motivasi yang rumit. Ada lebih dari satu alasan mengapa wisatawan berkunjung ke destinasi wisata tertentu; (4) permintaan pariwisata sangat elastis terhadap harga dan pendapatan.

Kegiatan pariwisata ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran. Kekhasan dan keunikan industri pariwisata menjadi daya tarik wisatawan untuk mengkonsumsi produk wisata. Namun demikian, permintaan pariwisata bersifat elastis, artinya permintaan terhadap produk wisata sangat dipengaruhi oleh perubahan yang relatif kecil dalam harga dan pendapatan. Artinya, kalau harga dan pendapatan naik atau turun sedikit saja, perubahan tersebut akan sangat mempengaruhi konsumsi jasa-jasa pariwisata. Disamping itu, perilaku wisatawan juga berbeda-beda. Sedikit sekali unsur loyalitas untuk sebagian besar para wisatawan manca Negara, mereka cenderung mengunjungi tempat yang berbeda tiap tahun dari pada kembali ke tempat yang sama setiap masa liburan. Maka setiap lokasi wisata harus berfokus pada sebagian (*segment*) dari seluruh pasar pariwisata.

Dalam industri pariwisata, pelaku usaha pariwisata menghadapi suatu produk yang hidup (*a living product*) dan suatu tempat tujuan wisata (*destination*). Saat ini terindikasi adanya perubahan preferensi dan motivasi wisatawan dunia yang berkembang sangat dinamis, sehingga wisatawan cenderung mencari pemenuhan kebutuhan fisik dan psikisnya dalam menikmati obyek yang spesifik (udara segar, pemandangan, pengolahan produk tradisional, agrobisnis, budaya & khas lokal, muatan cultural). Menjadi catatan penting bahwa walaupun keberadaan usaha pariwisata ditujukan untuk memuaskan wisatawan manca negara, tetapi lingkungan fisik, sosial, dan kebudayaan harus dilindungi.

Pengembangan pariwisata harus menjadi bagian integral pembangunan koperasi di Indonesia dalam tataran kebijakan, pilar-pilar kelembagaan, dukungan struktur permodalan yang kuat, sistem manajerial yang efektif, sistem pengawasan yang kuat, regulasi yang kondusif, perlindungan dan jaminan usaha, pengembangan standar kompetensi profesi kepariwisataan, promosi, jaringan dan sistem informasi, dan dukungan infrastruktur. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan sinergitas dan integrasi pembangunan koperasi dan pengembangan pariwisata yang memberi nilai guna dan optimalisasi bagi para pelaku usaha kegiatan kepariwisataan yang berkelanjutan.

V. Peluang dan Tantangan Koperasi Wisata

Konsep pembangunan yang berkelanjutan berkembang berdasar pada kenyataan terjadinya berbagai perubahan lingkungan karena aktifitas ekonomi manusia yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan juga menyangkut antisipasi terhadap perubahan iklim, kesempatan, dan viabilitas. Mc. Kurcher (2003) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan industri pariwisata secara berkesinambungan, yaitu masalah pemeliharaan ekologi, hubungan dengan masyarakat lokal dan kepuasan wisatawan. *World Tourism Organization (WTO)* memberikan prinsip-prinsip pengembangan ekologi, hubungan dengan masyarakat lokal dan kepuasan wisatawan. *World Tourism Organization (WTO)* memberikan prinsip-prinsip pengembangan industri pariwisata berkelanjutan dengan mengadakan keseimbangan pembangunan antara aspek lingkungan (*environmental*), ekonomi (*economic*) terutama ekonomi masyarakat lokal, dan sosial budaya (*socio cultural*). Dalam industri pariwisata, pengembangan pariwisata, pengembangan lingkungan dan pengembangan sosio ekonomi merupakan suatu sirkular dan hubungan kumulatif (Cater dan Goodall, 1997 :85). Pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan menempatkan aspek sumber-sumber lingkungan sebagai dasar kompromi yang menentukan prospek penduduk lokal dimasa yang akan datang.

Selanjutnya Fennel (1997) menyatakan bahwa ekowisata merupakan bentuk pariwisata alternatif atau pariwisata berkelanjutan. Ekowisata memiliki

beberapa karakteristik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu perjalanan yang bertanggung jawab, *mature resource-based* (pendekatan berbasis sumberdaya alam), kawasan yang relatif tidak terganggu, memperkenalkan konservasi dan preservasi lingkungan, dampak rendah, tidak konsumtif, dan berorientasi lokal, mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuhan, fauna dan manifestasi budaya, dan melakukan pemberdayaan masyarakat & keuntungan ekonomi lokal. Konsep ini sejalan dengan upaya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan *community-based tourism (CBT)*. Dalam istilah Indonesia, CBT adalah pariwisata berbasis kerakyatan merupakan gagasan yang relative baru, dimana munculnya gagasan ini antara lain karena pariwisata modern telah banyak mengabaikan posisi daripada masyarakat lokal.

Paradigma kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan pada (1) pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Based Development*); (2) persatuan dan Kesatuan Bangsa. (3) Peringatan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*), (4) Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dengan demikian, kekuatan pembangunan pariwisata berada pada masyarakat sebagai kekuatan dasar, Pariwisata berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, serta pariwisata adalah kegiatan seluruh lapisan masyarakat (Pemerintah hanya sebagai fasilitator). Berdasarkan hal ini, maka pembangunan pariwisata berbasis masyarakat diarahkan untuk mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan, mendorong tumbuhnya kemitraan, dan mendorong tumbuhnya daya saing lokal melalui pengembangan keunikan lokal.

Secara normative, dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 17 dinyatakan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara (1) Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan (2) Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar. Landasan normatif diatas merupakan peluang sekaligus tantangan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk berperan dalam industri pariwisata termasuk didalamnya industri agrowisata yang berbasis masyarakat lokal.

Secara makro, pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang menyumbang devisa di urutan ketiga (Menkokesra, 2008). Pada tahun 2007, BPS mencatat bahwa pariwisata berdampak menyerap 5,22% kesempatan kerja, berkontribusi 4,62% terhadap produk nasional, 4,62% terhadap pajak nasional, 4,29% dampak terhadap nilai tambah sektoral. Namun demikian pembangunan pariwisata masih dinikmati oleh pemilik modal (misalnya kasus di Bali, 80% investor asing) sedangkan masyarakat lokal hanya jadi penonton dan termarginalkan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Masalahnya adalah bagaimana masyarakat yang tergabung dalam koperasi dalam melaksanakan secara optimal dan efektif dalam pengusahaan dan pengelolaan pariwisata. Bagaimanakah kepariwisataan dapat dikembangkan melalui koperasi atau masuk sebagai bagian unit usaha di koperasi dan bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam koperasi. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana mengoptimalkan peran koperasi dalam kepariwisataan yang member manfaat dengan tetap mempertimbangkan lingkungan dan peluang pasar. Hal ini terkait pula dengan peran masyarakat lokal melalui koperasi dapat menjadi pelaku dan memperoleh nilai tambah dari kegiatan kepariwisataan yang ada di wilayah kerja koperasi bersama anggota.

Salah satu tantangan dari pengembangan pariwisata dan pembangunan koperasi adalah kemauan politik pemerintah dan stakeholder kepariwisataan untuk bersama-sama mendukung pemikiran dan mengimplementasikan pengembangan koperasi berbasis wisata atau koperasi wisata. Dukungan pemerintah kepada koperasi yang bersedia mengelola kegiatan kepariwisataan dapat berupa fasilitas kebijakan pengembangan koperasi wisata, peningkatan kapasitas SDM pengelola, pendampingan, perkuatan permodalan, bantuan promosi, peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan bagi koperasi, serta memfasilitasi terselenggaranya kemitraan usaha dengan stakeholder industri pariwisata.

Secara mikro dan operasional, koperasi diminta untuk bersikap profesional dalam kegiatan kepariwisataan. Misalnya, kegiatan agrowisata pada

dasarnya merupakan agro industri yang dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, bukan hanya meningkatkan nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai tambah lainnya seperti rekreasi alam (ekowisata), nilai keindahan, estetika, nilai ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta nilai sosial lainnya, dalam arti menggerakkan partisipasi masyarakat dan lembaga ekonominya (koperasi). Dengan demikian, dalam agrowisata memiliki nilai-nilai ganda yang jika dikelola dengan baik akan memberikan nilai tambah yang besar (KLN, 1998, Alekodra, 2001, Sugandi, 1998). Yang diperlukan untuk membangun pariwisata termasuk didalamnya agrowisata ada empat unsur, yaitu: waktu, uang, sumber daya, dan motivasi untuk berjalan. Kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2007 relatif tidak mengalami perubahan yang berarti. Dengan demikian, koperasi dalam mengelola agrowisata harus benar-benar srius dan memperhatikan aspek permintaan pasar agrowisata dari sisi perilaku dan kepuasan pengguna produk agrowisatanya, tidak hanya sebatas menyediakan produk ataupun sarana prasarana agrowisata. Artinya tidaklah cukup menyediakan sarana dan prasarana pariwisata, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan yang berbasis kepuasan dan kenikmatan (*pleasure*).

Jika koperasi berkontribusi pada sektor pariwisata, berarti porsi kegiatan koperasi pada kepariwisataan dalam ukuran ekonomi makro semakin menunjukkan peningkatan. Dalam dua dasawarsa ini, pariwisata berada dan bergerak dalam posisi penghasil devisa dengan pola yang hampir sama, sehingga cukup strategis dan menguntungkan bagi koperasi jika menempatkan kegiatan usaha pariwisata sebagai unit/bagian usahanya. Selain memiliki daya tahan terhadap ekonomi, sektor pariwisata bisa diandalkan sekaligus menjadi potensi yang masih memerlukan optimalisasi pembangunan dan pengembangannya di Indonesia. Dengan demikian, peran koperasi dalam kepariwisataan diharapkan dapat pula mendongkrak pendapatan sector kepariwisataan dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian secara makro. Secara makro, kegiatan pariwisata oleh koperasi memberikan nilai manfaat langsung dan tidak langsung bagi anggota, sehingga keberadaan koperasi memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian rakyat.

VI. Kesimpulan

1. Koperasi memiliki peluang dan terbuka kesempatan yang cukup luas untuk berperan dalam sektor energi dan pariwisata. Peluang ini dapat diraih dengan upaya maksimal dari koperasi sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan untuk mendapat kesempatan.
2. Koperasi perlu mempersiapkan diri dari aspek sumberdaya manusia profesional, kememadalan finansial, dan kekuatan kelembagaan guna mendukung upaya pengusahaan dan pengelolaan sektor energi maupun pariwisata.
3. Dukungan pemerintah secara konkrit dan nyata terhadap koperasi diperlukan untuk mengakui keberadaan koperasi dalam pengusahaan dan pengelolaan sektor energi dan pariwisata agar mempermudah proses akselerasi peran koperasi pada kegiatan-kegiatannya.
4. Koperasi sebagai badan usaha dan gerakan koperasi perlu pro aktif mengambil peran dalam sektor pengusahaan dan pengelolaan energi dan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Hanel, Alfred, 1994. *Dual or Double Nature of Cooperative*. Dalam *International Handbook of Cooperative Organizations*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Heliyanto, Bambang, 2009. *Konsep Desa Mandiri Energi*. Prosiding Lokakarya Nasional III Inovasi Teknologi Jarak Pagar untuk Mendukung Program Desa Mandiri Energi. Bayumedia Publishing. (www.balittas.litbang.deptan.go.id/md/images/jarakpagar/konsep_dme.pdf)

Inskip, E., (1994). *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*, Van Nostrand Reinhold, USA.

Marsongko, E. P., 1998. *Sustainable Tourism Development: A Case Study of Tourism Development in Karimunjawa Marine National Park, Jepara, Central Java, Indonesia*, Thesis, Bournemouth University, Bournemouth, England.

McIntyre, G., 1993. *Sustainable Tourism Development: Guide For Local Planners*, WTO, Madrid

Middleton, V. T. C., & Hawkins, R., 1998. *Sustainable Tourism: A Marketing Perspective*, Butterworth-Heinemann, Oxford.

Page, S.J. & R.K.Dowling, 2002. *Ecotourism*, Prentice Hall, Essex.

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT PLN (Persero) dengan Koperasi atau Badan Usaha Lain, tertanggal 23 Maret 2009.

Pitana, I G, 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem, dan dampak pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

Presiden Republik Indonesia. 2009. Sambutan Presiden Republik Indonesia pada hari koperasi ke-62, Samarinda, 15 Juli 2009. (www.dekopin.coop/download.asp).

Priyono dan Pranarka, 1996. *Pemberdayaan (Empowerment), Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi*. CSIS, Jakarta.

Ropke, Jochen, 1985. *The Economic Theory of Cooperative Enterprises in Developing Countries. With Special Reference to Indonesia*. Marburg.

Sharpley, Richard & Julia, 1997. *Rural Tourism: An Introduction*, Thomson Business Press, London

Smith, V.L & Edington, W.R., 1996. *Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism*, John Wiley & Sons, England

Spillan, J. Smith, 1994. *Ekonomi Pariwisata*.

Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.

Syamsu, Y., 2001. "Penerapan Etika Perencanaan pada kawasan wisata, studi kasus di kawasan Agrowisata Salsik Pondoh, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta". Jakarta: LP3M STP Tri Sakti. Jurnal Ilmiah, Vol 5 No. 3 Maret 2001.

Utama, I G.B. Rai, <http://bahankuliah.wordpress.com/2009/05/02/pariwisata-kajian-sosiologi-dan-ekonomi/>

Alpen Steel. Kesempatan koperasi dalam Usaha Ketenagalistrikan. (www.alpensteel.com/article/53-101/energi-terbarukan-renewable).

Wahab, Salah. 1975. *Tourism Management*. London: Tourism International Press.

Wood, Megan Epler, 2002. *Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability*, UNEP, France.

WTO, (1993), *Sustainable Tourism Development: Lesson for Planners*, WTO, Madrid.

Wylie, J., 1996. *Tourism and The Environment*, University of Hawaii at Manoa, June 24, 1997.

Yuyun, Wirasmita. 1996. *Fungsi Obyektif Koperasi*. Ikopin.

Riwayat Penulis
Dr. Ir. H. Erry Supriyadi R., MT., adalah Dosen Tetap YPK (Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)).
Agus Arifin, Dosen Tetap YPK (Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)).